

Pembatalan Persetujuan konferensi Meja Bundar tahun 1956

Puspa Dewi

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20156732&lokasi=lokal>

Abstrak

Melalui berbagai tingkatan pertempuran dan perundingan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka akhirnya konflik Indonesia - Belanda dapat diselesaikan lewat perundingan di Den Haag dalam suatu konferensi yang dinamakan Konferensi Meja Bundar (KMB) dimulai pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Sebagai hasil dari perundingan tersebut, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dan beberapa pasal yang harus diterima oleh RIS yaitu tentang pembayaran hutang yang diwariskan oleh pemerintah colonial Belanda, dan soal penangguhan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RIS. Jumlah hutang yang harus dibayar oleh RIS sebesar kurang lebih 1.130 juta dolar Amerika. Sedang wilayah Irian Barat ditangguhkan selama satu tahun dan statusnya akan ditentukan kemudian dengan jalan perundingan antara RIS dengan Belanda. Selama itu masalah dan status politiknya berada di bawah pengawasan United Nations Commission For Indonesia (UNCI). Dengan kesepakatan hasil-hasil KMB yang telah sama-sama diterima oleh kedua belah pihak (RIS dan Belanda), bukan berarti persoalan Indonesia-Belanda benar-benar telah berakhir, sebab dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya perundingan-perundingan yang menyangkut penyelesaian Irian Barat tidak pernah mencapai kesepakatan yang memuaskan terutama bagi Indonesia, itulah sebabnya di kalangan masyarakat luas, partai-partai politik dan organisasi lainnya timbul keinginan untuk membatalkan seluruh perjanjian KMB, karena sejak ditandatangani, Belanda senantiasa terutama sejak masa-masa awal penyerahan kedaulatan, selalu terlibat dalam persoalan-persoalan di Indonesia. Dan Indonesia menganggap bahwa pasal-pasal yang menyangkut perjanjian KMB, terutama soal-soal yang menyangkut keuangan dan ekonomi, dimana dalam pasal-pasal tersebut memberikan hak-hak istimewa yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Kemudian soal yang menyangkut hubungan Uni Indonesia Belanda yang diangkat oleh rakyat Indonesia sebagai sisa penjajahan Belanda. Sehingga ketika sampai tahun 1954, tidak ada tanda-tanda Belanda mau menyelesaikan masalah Irian Barat, maka Indonesia melakukan upaya untuk membatalkan perjanjian KMB dalam suatu perundingan yang diadakan di Den Haag pada bulan Juli tahun 1954. Dalam perundingan tersebut delegasi Indonesia yang dipimpin oleh menteri luar negeri Mr. Sunario hanya berhasil mencapai persetujuan tentang pembubaran Uni Indonesia Belanda, dan penghapusan beberapa perjanjian KMB yang mengenai hubungan Indonesia Belanda di bidang kebudayaan dan militer. Dalam perkembangan perundingan selanjutnya ketika masalah Irian Barat di bawa Indonesia ke Majelis Umum PBB tahun 1954, namun sidang-sidang ini tidak banyak menguntungkan Indonesia, sementara perundingan dengan Belanda juga tidak membawa hasil yang memuaskan bagi Indonesia. Oleh karena itu Indonesia terus melakukan upaya penyelesaian pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet Burhanudin Harahap pada tahun 1955 mengajukan Rancangan Undang-undang (RUTS) untuk membatalkan perjanjian-perjanjian KMB, tetapi walaupun RUU itu sudah disetujui oleh DPRS namun tidak dapat menjadi undang-undang, karena presiden Soekarno menolak untuk menandatangani, Alasan presiden karena pemilu 1955 sudah selesai, jadi adalah lebih

baik bila hasil pemilu yang menentukan UU itu. Selanjutnya dalam kabinet Ali II dalam programnya untuk menyelesaikan seluruh perjanjian KMB dalam bulan April 1956 mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) pembatalan perjanjian KMB kepada DPR dan tidak menghadapi banyak kesukaran. Melalui Undang-undang No.13 tahun 1956 Indonesia secara sepihak membatalkan seluruh perjanjian KMB, dan sejak itu Indonesia merasa tidak terikat lagi dengan seluruh perjanjian KMB, termasuk soal yang berkenaan dengan status wilayah Irian Barat. Belanda melakukan protes, dan memandang bahwa dengan tindakan pembatalan itu, Indonesia telah melanggar perjanjian Internasional.